

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa isu nikel adalah isu yang disekuritisasi oleh Pemerintah Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Alasan mengapa baru dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi kebijakan ini mulai digencarkan, karena pada masa era SBY kebijakan hilirisasi ini menuai penolakan, dan disaat Jokowi menjabat, *trend* nikel mulai naik karena Indonesia salah satu negara yang memiliki Cadangan nikel terbesar di dunia oleh sebab itu pemerintah harus segera konversi strategi pengolahan sumber daya alam mineral khususnya nikel. Karena menemui berbagai penolakan, di era SBY, pada masa pemerintah Jokowi, kebijakan hilirisasi terus digencarkan oleh pemerintah bahwa kebijakan ini harus dipatuhi karena adanya urgensi dari peningkatan kebutuhan nikel yang ketersediaanya terbatas, dan jika tidak dimanfaatkan maka nikel terus dieksploitasi yang berimbas terhadap perekonomian dan kedaulatan negara yang ujung-ujungnya merugikan Masyarakat dan para pelaku usaha nikel di Indonesia. Kebijakan hilirisasi yang dijalankan merupakan respons strategis terhadap ancaman yang dipandang menghambat kedaulatan nasional dan kemandirian ekonomi yang pada akhirnya memberikan dampak yang merugikan Masyarakat Indonesia terutama para pengusaha nikel di Indonesia. Sehingga termuan ini memenuhi lima komponen utama sekuritisasi karena memenuhi adanya *existential threat* – ekspor nikel bahan mentah, *referent object* – Masyarakat dan pengusaha nikel Indonesia, *securitizing actor* – Pemerintah Indonesia, *speech act*, dan *extraordinary measures*.

Sebagai aktor sekuritisasi (*securitizing actor*), Pemerintah Indonesia, melalui figur utama seperti Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Bahlil Lahadalia, secara aktif membangun narasi ancaman (*existential threat*) dalam berbagai forum nasional dan internasional (*speech act*). Pemerintah

menekankan bahwa sistem ekspor bahan mentah yang diwarisi dari era kolonial merupakan bentuk eksploitasi yang melanggar kedaulatan Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya secara mandiri demi kepentingan rakyat dan menghambat kemandirian ekonomi Indonesia yang berpotensi menghalangi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju.

Dalam menanggapi ancaman tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah langkah luar biasa (*extraordinary measures*), diantaranya melalui kebijakan hilirisasi nikel sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, serta memperkuat industri dalam negeri. Langkah konkret yang diambil meliputi penerbitan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 yang melarang ekspor nikel mentah, perlawanan terhadap gugatan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO), serta kebijakan divestasi saham untuk membatasi dominasi asing dalam industri pertambangan nasional.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sekuritisasi isu nikel merupakan strategi multidimensional yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi politik dan keamanan nasional. Kebijakan hilirisasi nikel yang diterapkan pemerintah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah komoditas. Dengan demikian, sekuritisasi isu nikel di bawah kepemimpinan Joko Widodo dilakukan karena adanya urgensi yang mengancam perekonomian serta kedaulatan negara yang berimbas kepada kehidupan Masyarakat Indonesia terlebih pelaku pengusaha nikel, sekaligus kebijakan hilirisasi ini juga sebagai instrumen utama dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia Emas 2045.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat dua saran yang dapat diajukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan kebijakan pemerintah terkait sekuritisasi isu nikel:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi data sekunder dengan data primer melalui wawancara terhadap target audiens, seperti masyarakat umum serta para pelaku usaha di sektor pertambangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tingkat penerimaan masyarakat terhadap narasi ancaman yang dibangun oleh pemerintah. Wawancara dengan pemangku kepentingan utama, misalnya Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), dapat memberikan perspektif yang lebih jelas dan mendalam mengenai bagaimana kebijakan hilirisasi nikel dan sekuritisasi isu nikel dipersepsikan oleh pihak yang terdampak langsung.
2. Masih terdapat ruang yang dapat dikembangkan dalam aspek pengukuran penerimaan audiens, khususnya dalam hal indikator yang digunakan. Dalam penelitian ini, indikator penerimaan audiens yang digunakan telah memberikan gambaran mengenai respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, namun penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan indikator tambahan yang lebih spesifik dan terukur. Misalnya, pendekatan melalui survei opini publik atau metode kuantitatif lainnya dapat menjadi alternatif untuk memperoleh data yang lebih rinci mengenai bagaimana berbagai kelompok masyarakat memahami dan merespons isu sekuritisasi nikel. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan dapat semakin komprehensif dan memperkaya pemahaman mengenai dinamika penerimaan audiens terhadap kebijakan pemerintah.

Dengan adanya saran ini, diharapkan kebijakan sekuritisasi isu nikel dapat terus berkembang secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi perekonomian dan kedaulatan nasional Indonesia.